

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pessel
Tahun Anggaran	: 2018

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akan menambah kemampuan dan keahlian aparatur dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Gambaran Umum

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan suatu kebutuhan yang harus disediakan oleh kantor guna meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan informasi guna meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2018.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan bacaan dan peraturan perundangan-undangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna terlaksananya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovernment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

1. Belanja Jasa Kantor (surat kabar/majalah);
2. Belanja Modal Pengadaan Umum (Pembelian Buku Umum).

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.1.02.10.01.01.15. sebesar Rp.21.400.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus ribu ratus rupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 (Januari s.d Desember 2018) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2018;
2. Pelaksanaan Proses penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebanyak 2 tahapan dengan rincian;
 - ~ Tahap I (pertama)
(Penyediaan Surat Kabar 3 Media) : Bulan Januari s.d Desember 2018
 - ~ Tahap II (kedua)
(Penyediaan Bahan Bacaan) : Bulan Februari dan November 2018
3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	a. Bahan Bacaan/Surat Kabar												
3	b. Bahan Bacaan/Peraturan												
4	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
5	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

(dto)

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19700609 199703 1 002

Drs. ADRI, M.Si.
NIP. 19680216 198902 1 001